

NAMA : RISKI PUTRI AMALIA

NIM : D2A604045

JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK

“ IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM RASKIN (Beras Rakyat Miskin) DI KECAMATAN KOTA KABUPATEN KUDUS “.

Kemiskinan dapat menjadi masalah utama dalam proses pembangunan, karena kemiskinan menyebabkan terjadinya kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian, dan juga ketidakmampuan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi yang sebenarnya dapat membantu proses pembangunan. Prioritas pembangunan nasional adalah mempercepat pemulihan ekonomi. Salah satu di antaranya adalah penanggulangan kemiskinan dan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.

Program-program penanggulangan kemiskinan yang selama ini dilaksanakan masih banyak mengalami kemacetan, penyelewengan bahkan memunculkan ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah sebagai pemberi bantuan dana dan fasilitas. Implementasi kebijakan RASKIN (Beras Rakyat Miskin) dilaksanakan karena kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan bantuan pangan sangat benar-benar dibutuhkan terutama oleh masyarakat miskin yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Selain kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan bantuan RASKIN, juga ada faktor lain yang memang perlu diperhatikan dalam kesuksesan implementasi kebijakan RASKIN (Beras Rakyat Miskin) ini yaitu

mengenai komunikasi, dalam hal ini adalah sosialisasi antara pemerintah dengan masyarakat.

Hal lain yang berpengaruh dalam Implementasi RASKIN (Beras Rakyat Miskin) yakni sumber daya, dimana pemerintah setempat sebagai penyalur serta masyarakat miskin sebagai penerima bantuan dapat memaksimalkan apa yang diberikan oleh pemerintah Pusat sehingga bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak menerima.

Dari identifikasi masalah diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar hubungan antara variabel komunikasi (X_1) dengan variabel implementasi kebijakan Beras Rakyat Miskin (Y).
2. Seberapa besar hubungan antara variabel sumber daya (X_2) dengan variabel implementasi kebijakan Beras Rakyat Miskin (Y).
3. Seberapa besar hubungan antara variabel komunikasi (X_1) dan variabel sumber daya (X_2) dengan variabel implementasi kebijakan Beras Rakyat Miskin (Y).

Penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode (1982 : 21). Adapun tujuan dari penelitian adalah :

C.1 Tujuan umum

Untuk menganalisis Implementasi Kebijakan program RASKIN (Beras Rakyat Miskin) di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus

C.2 Tujuan khusus

- a. Untuk menganalisis tingkat keberhasilan Implementasi dalam pelaksanaan Kebijakan program RASKIN (Beras Rakyat Miskin) di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus
- b. Untuk menganalisis variabel Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan program RASKIN (Beras Rakyat Miskin) di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus
- c. Untuk menganalisis variabel Komunikasi dan Sumber daya dalam hubungannya dengan Implementasi Kebijakan program RASKIN (Beras Rakyat Miskin) di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus
- d. Untuk menguji hipotesis diantara variabel yang terkait
- e. Untuk mencari besarnya pengaruh variabel Komunikasi dan sumber daya dalam Implementasi Kebijakan program RASKIN (Beras Rakyat Miskin) di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus

Teori yang Mendasari Penelitian

Adapun model implementasi kebijakan yang mengakomodasikan antara komunikasi dan sumber daya dalam penelitian RASKIN di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus adalah teori implementasi yang diperkenalkan oleh George Edwards III. Subarsono dalam bukunya Analisis Kebijakan Publik (2005:90). Bahwa implementasi suatu kebijakan organisasi dipengaruhi oleh 4 variabel yaitu sebagai berikut :

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi sasaran kebijakan harus

ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran tidak jelas maka akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kurang sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar berjalan dengan efektif.

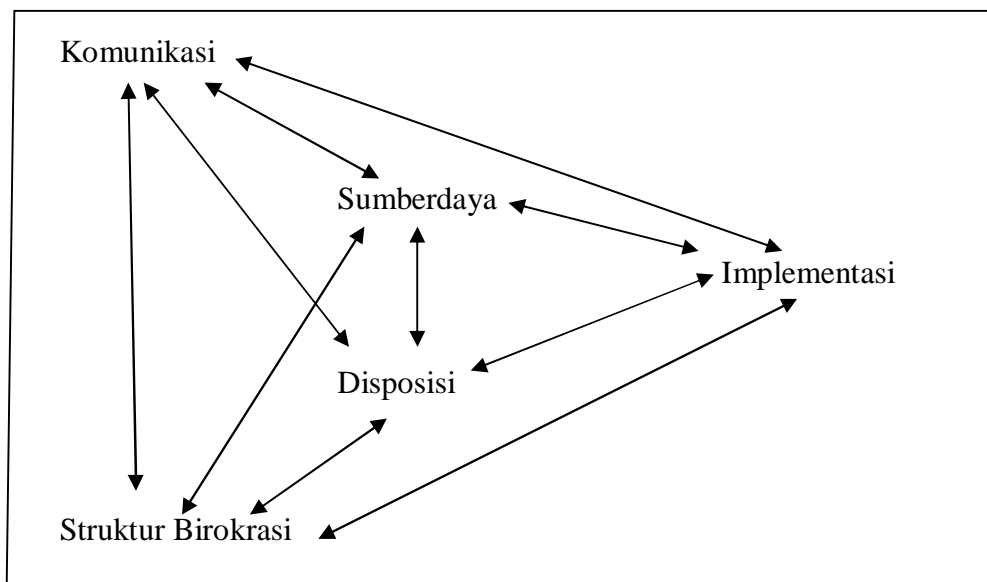
3. Disposisi/ Sikap

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor mempunyai disposisi yang baik, maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang menjadi standar.

Gambar 1.1
Faktor Penentu Implementasi menurut Edward III



Sumber : Edwards III, 1980:148

Teori lain yang digunakan dalam penelitian RASKIN di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus adalah teori implementasi yang dikemukakan oleh duet Meter dan

Horn (1975 : 99) yang mengandaikan bahwa kebijakan telah berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementasi dan kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimaksud sebagai variabel yang mempengaruhi Kebijakan Publik adalah variabel standard an sasaran organisasi, sumberdaya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksanan atau implementor, kondisi ekonomi, social dan politik serta kecenderungan sikap (disposisi) dari pelaksana atau implementor. (Subarsoso; 2005 : 99).

1. Standard an Sasaran Kebijakan

Standard dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standard an sasaran kurang jelas maka kemungkinan yang akan terjadi kebijakan tersebut akan sulit untuk diimplementasikan.

2. Sumber daya

Keberhasilan implementasi kebijakan perlu adanya dukungan sumberdaya baik dari manusia maupun non manusia. Sumberdaya merupakan faktor yang penting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan agar berjalan dengan efektif.

3. Komunikasi dan organisasi

Implementasi suatu kebijakan perlu adanya dukungan dan koordinasi dari instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dengan instansi lain bagi keberhasilan suatu program.

4. Karakteristik agen pelaksana

Karakteristik agen pelaksanan mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya akan mempengaruhi implementasi suatu program.

5. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

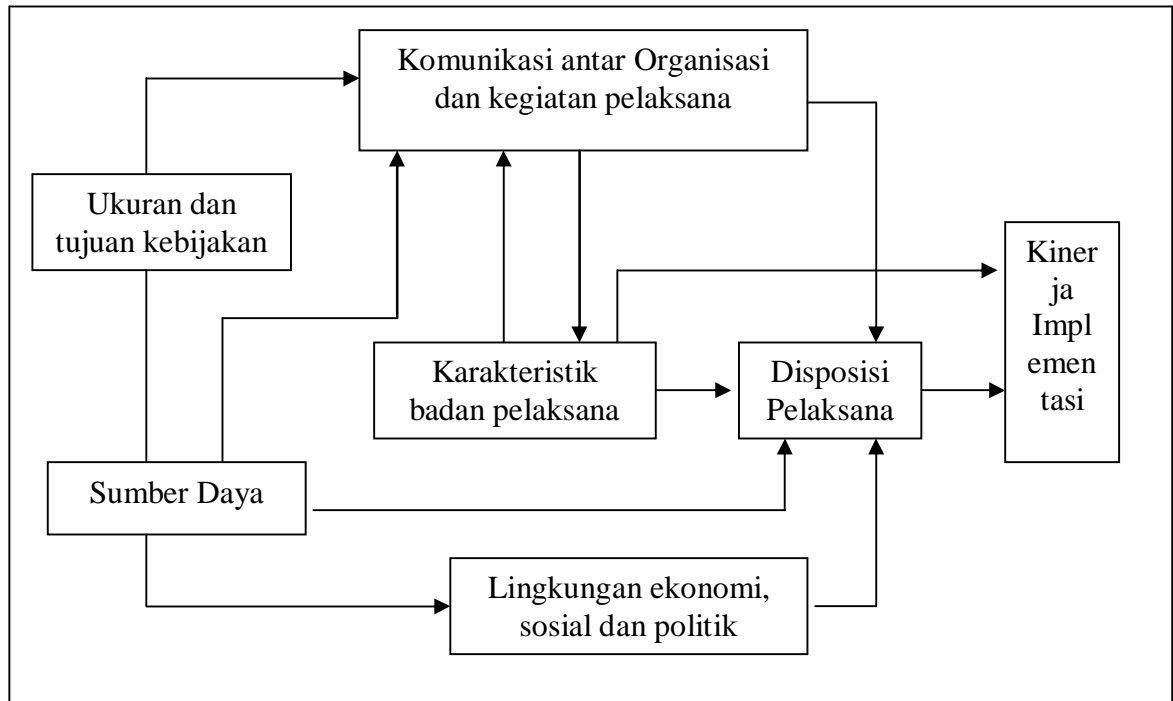
Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi suatu program; sejauh mana kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipasi, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

6. Disposisi Implementor

Disposisi implementor mencakup tiga hal yakni (a) respons implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemampuannya untuk melaksanakan kebijakan; (b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; dan (c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Gambar 1.2

Model Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn



Koefisien Konkordansi telah diketahui dengan bantuan perhitungan komputer (SPSS), yaitu W sebesar 0,654. Setelah dilakukan transformasi harga W kedalam Chi Kuadrat diperoleh harga Chi kuadrat sebesar 84,37. Kemudian harga X^2 dikonsultasikan dengan harga kritis Chi Kuadrat dengan derajat kebebasan $db = N-1$, yaitu $37 - 1$. Pada taraf signifikansi 5 %, harga kritis tabel pada taraf signifikansi 5 % menunjukkan angka 55,75. Dari hasil konsultasi tersebut diketahui bahwa nilai hitung $X^2 > X^2$ tabel pada taraf signifikansi 5 %, yaitu :

$$\text{Taraf signifikansi 5 \% : } X^2 \text{ hitung} > X^2 \text{ tabel atau } 84,37 > 55,75$$

Berdasarkan analisis data diatas menunjukkan bahwa antara variabel komunikasi (X1) dan variabel sumber daya (X2) mempunyai hubungan yang positif dengan variabel implementasi program Raskin (Y) di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan terdapat hubungan positif antara variabel komunikasi dan variabel sumber daya dengan variabel implementasi program Raskin di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus **dapat diterima**. Adapun besarnya pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y dapat diketahui melalui rumus Koefisien Determinasi (KD) sebagai berikut :

$$\begin{aligned} KD &= W^2 \times 100 \% \\ &= 0,654^2 \times 100 \% = 0,4277 \times 100 \% \\ &= 42,77 \% \end{aligned}$$

Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa pada variabel implementasi program terjadi perubahan sebesar 42,77 % sebagai akibat adanya pengaruh dari

komunikasi dan sumber daya serta pengaruh variabel lainnya sebesar 57,23 %. Variabel lainnya yang dimaksud disini seperti disposisi (watak dan karakteristik implementator), struktur birokrasi, standar dan sasaran kebijakan, kondisi sosial, politik, ekonomi dan lain sebagainya. Dengan demikian hipotesis yang dikemukakan sebelumnya pada kerangka dasar pemikiran yang dinyatakan bahwa variabel komunikasi (X1) dan variabel sumber daya (X2) merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi implementasi program (Y) dapat **diterima**. Hal ini dapat dibuktikan melalui pengujian hipotesis yang diwujudkan dalam bentuk analisis tabel silang, Koefisien Korelasi Rank Kendall, Koefisien Konkordasi Kendall, dan Koefisien Determinan dimana **hipotesis dapat diterima secara signifikan**.

Berdasarkan data yang diperoleh dan melihat tujuan dilakukannya penelitian ini, maka terlihat adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan program Raskin di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, antara lain :

1. Pengkajian pada variabel implementasi program Raskin (Y) menghasilkan persentase dari frekuensi jawaban responden menjadi empat kategori, sebagai berikut : kategori sangat tinggi sebesar 27,3 %, kategori tinggi 29,5 %, kategori kurang tinggi 36,4 %, dan kategori rendah 6,8 %. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi program Raskin di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus masuk dalam kategori tinggi. Hal ini bukan berarti dalam implementasi program Raskin tidak ada kendala atau masalah yang dihadapi. Berikut ini ada beberapa hal yang menunjukkan adanya kendala atau masalah yang dihadapi dalam implementasi program Raskin, antara lain :

- a. Masih banyak masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan Raskin sedangkan ada beberapa masyarakat yang dinilai masuk dalam golongan mampu malah mendapatkan bantuan Raskin. Hal ini menunjukkan masih belum jelas dan keterbukaan yang kurang dalam menentukan kategori miskin.
 - b. Jumlah bantuan Raskin yang diberikan terkadang tidak sesuai dengan yang dibagikan kepada masyarakat. Hal ini terjadi karena tidak adanya ataupun kurangnya pengawasan dari pihak terkait mengenai pelaksanaan program Raskin.
2. Pengkajian pada variabel komunikasi (X1) menghasilkan persentase dari frekuensi jawaban responden menjadi empat kategori, sebagai berikut : kategori sangat tinggi sebesar 9,1 %, kategori tinggi 22,7 %, kategori kurang tinggi 52,3 %, dan kategori rendah 15,9 %. Dari hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa komunikasi yang dilakukan dalam pelaksanaan program Raskin di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus masuk dalam kategori kurang tinggi. Hal ini berarti terdapat masalah yang menyebabkan komunikasi dalam pelaksanaan program Raskin di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus menjadi kurang tinggi. Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, ternyata ditemukan beberapa permasalahan, sebagai berikut :
- a. Masih adanya kesalahpahaman persepsi mengenai kemiskinan sehingga banyak masyarakat yang mengaku miskin untuk mendapatkan bantuan. Hal tersebut juga terjadi pada petugas pelaksana program yang kadang kurang terbuka kepada masyarakat untuk menjelaskan mengenai masyarakat mana

yang dikategorikan miskin yang layak mendapatkan bantuan Raskin.

- b. Tidak semua wilayah di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus pernah mengadakan pertemuan secara khusus untuk membahas pelaksanaan program Raskin. Hal ini terjadi karena petugas pelaksana program tidak secara menyeluruh mengunjungi setiap daerah untuk melakukan sosialisasi.
 - c. Pertemuan sosialisasi yang diadakan juga jarang dihadiri oleh masyarakat. Mereka tidak menghadiri pertemuan tersebut dengan alasan bahwa mereka tidak mendapatkan undangan ataupun tidak memiliki waktu luang untuk hadir dalam pertemuan tersebut.
 - d. Intensitas untuk bertanya dari masyarakat masih sangat kurang karena mereka seakan-akan hanya pasrah menerima keadaan.
3. Pengkajian pada variabel sumber daya (X2) menghasilkan persentase dari frekuensi jawaban responden menjadi empat kategori, sebagai berikut : kategori sangat tinggi sebesar 38,6 %, kategori tinggi 29,5 %, kategori kurang tinggi 15,9 %, dan kategori rendah 15,9 %. Berdasarkan dari kategori jawaban di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sumber daya yang ada dalam pelaksanaan program Raskin di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus masuk dalam kategori sangat tinggi/baik. Hanya saja dalam prakteknya dilapangan pada variabel ini terdapat beberapa masalah yang menyebabkan kurang lancarnya pelaksanaan program Raskin, seperti :
- a. Adanya sikap antipati dari masyarakat terhadap pemerintah karena menganggap pemerintah kurang serius untuk mengentaskan kemiskinan

dengan memberikan bantuan yang kuantitas dan kualitasnya rendah. Hal ini menyebabkan masyarakat kurang respek dengan setiap program yang dicanangkan pemerintah.

- b. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program Raskin, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitasnya sehingga masih sering terjadi masalah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan program.

Setelah dilakukan penghitungan dengan rumus statistik Koefisien Korelasi Rank Kendall dan Koefisien Konkordansi Kendall, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Adanya hubungan signifikan antara variabel komunikasi (X1) dengan implementasi program (Y) yang dibuktikan dari hasil (r)= 0,439 dan $Z= 4,20$ dan ternyata dengan uji signifikansi 1 % dan 5 % harga Z hitung 4,20 lebih besar daripada harga Z tabel pada taraf signifikan 1 % dan 5 % sehingga **Hipotesis diterima**. Adapun besarnya pengaruh antara komunikasi terhadap implementasi program digunakan rumus koefisien determinasi menghasilkan $KD = 19,27\%$. Ini menunjukkan komunikasi berpengaruh terhadap implementasi program sebesar 19,27 % dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.
2. Adanya hubungan yang signifikan antara variabel sumber daya (X2) dengan implementasi program (Y) yang dibuktikan dari hasil (r)= 0,331 dan $Z = 3,17$ dan ternyata dengan uji signifikansi 1% dan 5% harga Z hitung 3,17 lebih besar daripada harga Z tabel pada taraf signifikan 1 % dan 5 % sehingga **Hipotesis**

diterima. Besarnya pengaruh sumber daya terhadap implementasi program diketahui dengan menggunakan rumus koefisien determinasi menghasilkan nilai $KD = 10,96 \%$. Ini menunjukkan sumber daya berpengaruh terhadap implementasi program sebesar $10,96 \%$ dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

3. Adanya hubungan yang signifikan antara komunikasi (X1) dan sumber daya (X2) terhadap implementasi program (Y) yang dibuktikan dari hasil Koefisien Konkordasi Kendall (W) yang menunjukkan angka W sebesar 0,654 dan uji signifikansi menghasilkan nilai sebesar 84,37. Nilai tersebut dikonsultasikan dengan tabel dengan taraf signifikan $1\% = 51,80$ dan $5\% = 55,75$ menunjukkan bahwa () observasi $84,37 > ()$ tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa **hipotesis dapat diterima** secara signifikan.

4. Adapun besarnya pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y dapat diketahui melalui rumus Koefisien Determinasi (KD), yakni sebesar $42,77 \%$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi program dipengaruhi sebesar $42,77 \%$ akibat adanya pengaruh dari komunikasi dan sumber daya serta pengaruh variabel lainnya seperti disposisi (watak dan karakteristik implementator), struktur birokrasi, standar dan sasaran kebijakan, kondisi sosial, politik, ekonomi dan lain sebagainya sebesar $57,23 \%$.

A. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan kesimpulan seperti di atas mengenai implementasi program Raskin di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus,

berikut ini penulis akan memberikan beberapa saran atau rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi alternatif dalam membantu memecahkan masalah ataupun menyempurnakan implementasi program pada masa yang akan datang, antara lain :

1. Untuk meningkatkan keberhasilan implementasi program Raskin di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus dapat dilakukan beberapa upaya seperti berikut ini :

- a. Memperketat pelaksanaan program dengan melakukan pengawasan yang lebih intensif untuk menghindari terjadinya penyelewengan-penyelewengan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Pengawasan dapat dimulai pada awal perencanaan dimana petugas menentukan siapa saja masyarakat yang berhak mendapat bantuan sesuai dengan kriteria penerima Raskin . Setelah itu pada tahap pelaksanaan serta evaluasi juga perlu diadakan pengawasan sehingga bantuan tersalurkan kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerima. Pengawasan dapat dimulai antar para pelaksana program masing-masing, penerima bantuan yakni dari pihak masyarakat itu sendiri serta pengawasan juga dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak independen seperti LSM dan lain sebagainya.
- b. Petugas pelaksana program harus bersikap lebih adil kepada semua masyarakat miskin, terutama yang berkaitan dengan pendaftaran calon penerima bantuan. Ketentuan yang ada dalam Pedoman Pelaksanaan Program Raskin harus dengan tegas diterapkan.
- c. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja petugas pelaksana. Hal ini dapat dilakukan dengan selalu memberikan yang terbaik kepada

masyarakat, memberikan laporan mengenai hasil pelaksanaan program, baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan program. Kepercayaan masyarakat kepada petugas pelaksana program tentu saja akan berpengaruh pada opini masyarakat terhadap kinerja pemerintah sehingga nantinya jika ada program pemerintah lain yang diselenggarakan, maka masyarakat akan dengan senang hati mendukung pelaksanaannya.

2. Untuk meningkatkan keberhasilan komunikasi program Raskin di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus dapat dilakukan beberapa upaya seperti berikut ini :
 - a. Mengadakan pertemuan rutin sebulan sekali antara pelaksana program yakni Kepala Desa dan Ketua RT serta masyarakat penerima bantuan, di Balai Desa atau tempat lain yang sudah disepakati bersama yang khusus membahas tentang perkembangan pelaksanaan program Raskin, Pertemuan rutin dapat menjaga komunikasi antar masyarakat sehingga masyarakat yang kurang mengetahui maksud dan tujuan program maupun informasi tentang program Raskin dapat lebih mengetahuinya.
 - b. Memberikan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan program Raskin pada saat pertemuan rutin bulanan, sehingga segala permasalahan yang dihadapi dapat segera dicarikan jalan keluarnya dan dapat segera menyusun strategi yang dapat diterapkan dalam program Raskin selanjutnya.
 - c. Memaksimalkan fungsi pendampingan oleh petugas pelaksana program kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak hanya menerima bantuan saja melainkan agar masyarakat memiliki motivasi untuk mau meningkatkan

kesejahteraan hidupnya. Fungsi pendampingan ini juga dapat memudahkan pengawasan atas pemberian dan penggunaan bantuan.

3. Untuk meningkatkan keberhasilan sumber daya program Raskin di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus dapat dilakukan beberapa upaya seperti berikut ini :

- a. Memberikan prioritas yang terbaik kepada masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan menambah jumlah bantuan yang akan diberikan tentu saja dengan kualitas yang baik juga. Selain itu, menambah dan memperbaiki sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program misalnya, sound system, karung beras, timbangan, meja kursi dan lain sebagainya.
- b. Petugas pelaksana hendaknya lebih meningkatkan kemampuannya diberbagai bidang yang berkaitan dengan pelaksanaan program Raskin. Hal ini sangat perlu karena situasi dan kondisi saat pemberian bantuan kadang di luar perkiraan sehingga memerlukan kontrol ataupun pengawasan yang lebih intensif.

4. Bagi peneliti lain yang tertarik pada penelitian mengenai implementasi program Raskin di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, hendaknya melengkapi hasil penelitian dengan melihat variabel-variabel lain seperti disposisi, struktur organisasi, maksud dan tujuan kebijakan, kondisi sosial ekonomi masyarakat, sikap dan kemampuan petugas pelaksana dan lain sebagainya.

